



INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR



RENCANA KERJA

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang merupakan implementasi tahunan dari Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) II Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ini dapat menjadikan acuan kerja kami selama 1 (satu) tahun ke depan, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Sidoarjo, Juli 2023

Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19630325 198903 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG	4
1.2. LANDASAN HUKUM	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022.....	9
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2022) DAN CAPAIAN.....	9
RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR.....	9
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR.....	32
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	36
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD PROVINSI JAWA TIMUR	36
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	48
3.1. A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	48
3.2. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT	49
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	60
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR.....	60
BAB V PENUTUP.....	63
5.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN	63
5.2. RENCANA TINDAK LANJUT	64

DAFTAR TABEL

1. Tabel T-C.29.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2021. 14
2. Tabel. 2.3.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. 35
3. Tabel T-C.31.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Timur. 37
4. Tabel 2.5.1.	Usulan kabupaten kota hasil pelaksanaan musrenbang RKPD Tahun 2022 yang di akomodir. 47
5. Tabel 2.5.2.	Usulan kabupaten kota hasil pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2022 yang di tidak di akomodir. 47
6. Tabel 2.5.3.	Dukungan perangkat daerah dalam pokok-pokok pikiran Dewan. 47
7. Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Timur. 51
8. Tabel T-C.33.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023. 54
9. Tabel 4.1.	Program Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Provinsi dan Program Icon Gubernur Tahun 2023 61
10. Tabel 4.2.	Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023 62

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan perencanaan jangka pendek satu tahun (RKPD). Disamping itu menunjuk pada Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Inspektorat membuat dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan perencanaan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Renja perangkat Daerah merupakan penjabaran program dan kegiatan serta anggaran yang lebih detail dari rencana strategis 5 tahunan yang telah disusun oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Renja disusun sebagai pedoman kerja selama satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun untuk jangka waktu 5 tahunan dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah RKA disetujui maka akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat mendukung visi Gubernur terpilih yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”**. Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Misi Gubernur yang merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah dalam mewujudkan visi.

Dalam pelaksanaannya Inspektorat mendukung Misi Gubernur yang ke 3 :

“Tata kelola pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.”

Dalam kerangka organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat memiliki peranan dan fungsi yang cukup strategis dalam menjaga dan mengawal tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan Pemerintahan yang anti Korupsi.

Selanjutnya tema RKPD Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2024 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Transformasi Ekonomi Inklusif Menuju Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak”. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka banyak hal yang harus dilakukan dan dikawal pelaksanaannya dalam segala aspek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, antara lain :

- a) Penguatan sistem pencegahan korupsi terintegrasi dan berdayaguna;
- b) Mengawal pelaksanaan Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh KPK;
- c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Maturitas SPIP yang terintegrasi;
- d) Pengembangan program sosialisasi dan kampanye anti korupsi pada pengguna layanan serta upaya capaian program anti korupsi;
- e) Penguatan APIP dengan penguatan SDM dan Kompetensi;
- f) Penguatan proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-katalog.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Timur.
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927).
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E).

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembarang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 13-238/2021).
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39, seri E).
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Renstra Kedua.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun, yang didasarkan atas capaian/realisasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 serta proyeksi capaian hingga triwulan I tahun anggaran 2023 yang disesuaikan dengan perubahan kondisi kemampuan sumber daya manusia, kemampuan anggaran serta kondisi lainnya.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan anggaran Tahun 2024;
2. Sebagai dasar untuk menentukan target capaian Tahun 2024;
3. Sebagai dasar untuk menentukan kegiatan yang harus dilaksanakan pada Tahun 2024;
4. Sebagai pedoman arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan pada Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Bab II ini berisi penjabaran mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022.

Disamping itu bab ini berisi tentang prakiraan capaian kinerja pada tahun berlalu yaitu Tahun 2022 (periode Januari s.d. Desember 2022), dan capaian Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur, analisis kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, review terhadap RKPD Provinsi Jawa Timur dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, maka disusun Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Inspektorat, yang diharapkan akan mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur.

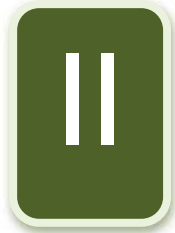
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjabaran mengenai prioritas Inspektorat yang mendukung prioritas provinsi, prioritas Inspektorat terkait dengan tugas fungsi reguler, serta program dan kegiatan di tahun 2024.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022



2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2022) DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 merupakan target tahun keempat dari Periode Renstra tahun 2019-2024. Dalam perjalanannya dokumen RPJMD mengalami perubahan, sehingga menyebabkan adanya Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024. Sehingga dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 pun juga harus menyesuaikan dengan perubahan dari RPJMD 2019 – 2024 maupun perubahan Renstra 2019 – 2024. Oleh karena itu diperlukan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 serta progres pencapaian kinerja dalam Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan program dan kegiatannya.

Terkait dengan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan, walaupun masih terdapat beberapa program/kegiatan yang pencapaian kinerjanya tidak mencapai 100%. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2023 (periode Januari s.d. Maret 2023) diperkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatan akan sesuai dengan target Rencana Kerja Tahun 2024.

Selama Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah melakukan pembinaan, konsultasi, maupun pendampingan terkait keuangan daerah dan juga kegiatan lainnya antara lain :

1. Pelaksanaan Pendampingan Manajemen Risiko di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Pendampingan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Inspektorat sebagai APIP agar Manajemen Risiko di lingkup Perangkat Daerah seluruhnya dapat memiliki dokumen Manajemen Risiko. Manajemen Risiko merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Pelaksanaan Pendampingan Manajemen Risiko telah dilaksanakan di :

1. Dispora
2. Bappeda
3. DP3AK

4. Bapenda
 5. Dinas Pertanian
 6. Dinas Kehutanan
 7. Dinas Perhubungan
 8. Dinas Kesehatan
 9. BPKAD
 10. Dinas Perkebunan
 11. BPBD
 12. Dinas Peternakan
 13. Dinas Sosial
 14. Dinas Pendidikan
 15. Dinas Koperasi
 16. Dinas Kominfo
 17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 18. Dinas Kelautan dan Perikanan
 19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 20. Balitbang
 21. Dinas Lingkungan Hidup
 22. DPMD
 23. Dinas Perpustakaan
2. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.
 1. Dinas PU Bina Marga
 2. Dinas Perhubungan
 3. Badan Pendapatan
 4. Dinas Kesehatan
 5. Dinas PU SDA
 6. BPKAD
 7. Dinas Pendidikan
 8. Bappeda
 9. Dinas Perumahan Rakyat dan Cipta Karya
 10. Dinas Tenaga Kerja
 11. Dinas Kelautan
 12. Balitbang
 13. Dinas Sosial
3. Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention KPK RI

Inspektorat selaku admin dari Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention, dimana MCP ini merupakan sebuah wujud Langkah-langkah upaya untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi, sehingga terwujudnya sistem dan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan

dan akuntabel. MCP ini memiliki 7 area intervensi antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan BMD. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh capaian realisasi penilaian MCP dengan Total 96,18, dengan Peringkat Nasional urutan 14.

4. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Survei Penilaian Integritas ini diinisiasi oleh KPK RI sejak 2016 dan bekerja sama dengan BPS. Penilaian SPI bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD. Survei Penilaian SPI ini sesungguhnya dilakukan untuk mendapatkan penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD yaitu pegawai, pengguna layanan/ mitra Kerjasama dan ekspert/ahli dari berbagai kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Hasil survei berbentuk angka indeks menunjukkan level integritas instansi dengan skala 1-100. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani Ketika terjadi tindak pidana korupsi tersebut semakin baik.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan nilai SPI dengan nilai 73,11. Nilai SPI Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibanding nilai SPI Nasional dengan nilai 71,94.

5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Berikut ini adalah realisasi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH LHP	JUMLAH TEMUAN					%
			TMN	RKM	S	DP	B	
1	2017	89	796	1116	915	103	98	81,99
2	2018	63	582	748	488	81	174	65,24
3	2019	95	1176	1523	1099	100	325	72,16
4	2020	70	839	1064	644	49	372	60,53
5	2021	76	809	1128	614	64	419	54,43
6	2022	54	898	1136	378	32	725	33,27
keseluruhan				6715	4138			61,62

6. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jendral Kemendagri.
 Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah terselesaikan adalah 93 %, dengan rincian Temuan ada 17, dan Rekomendasi 31.
7. Pelaksanaan Reviu
 Inspektorat dalam melaksanakan pemenuhan data dukung Monitoring Center for Prevention melaksanakan Reviu antara lain :
 - a. Reviu Perencanaan dan Penganggaran APBD.
 - b. Reviu RKPD
 - c. Reviu ASB dan SSH.
 - d. Reviu KUA dan PPAS
 - e. Reviu HPS dan Reviu Tata Kelola Perijinan dan Non Perijinan
 - f. Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
 - g. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah.
 - h. Reviu Tata Kelola BMD.
8. Pelaksanaan Kapabilitas APIP
 Dalam mendorong percepatan peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang bersih, dan efektif maka pemerintah di dalam RPJMN 2015-2019 telah secara khusus memasukkan peningkatan kapabilitas APIP sebagai salah satu bagian dari agenda pembangunan. Salah satu perintah Presiden adalah agar kapabilitas APIP di setiap K/L/PD pada akhir 2019 berada di level 3 (integrated). Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Timur berada di Level 3.
9. Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional atas Kinerja dan Keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Pemeriksaan ini dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah dan beberapa UPT Teknis terkait.

Evaluasi capaian atas pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun lalu yaitu tahun 2022 dan prakiraan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C. 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2022.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021			Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6		7	8	9		10	11
XXX01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase indikator program yang tercapai	77	%	89								
		Persentase realisasi anggaran	90	%	96								
xxx01001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	6	Dok	77								
xxx01002	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	14	Lap	14								
xxx01003	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	6	dok	6								
30515	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kerugian Daerah	50	%	47								
30515001	Pengawasan Reguler PD/ UPT	Obyek Pemeriksaan	90	obyek	88								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021			Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
30515002	Monev Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	Obyek Pemeriksaan	60	obyek	27							
30515003	Pemeriksaan Tujuan Tertentu/ Kasus/ Khusus	Obyek Pemeriksaan	45	obyek	75							
30515004	Klinik Konsultasi Bantuan Keuangan di Desa	Jumlah kabupaten yang dilakukan klinik konsultasi	12	Kab	12							
30515005	Klinik Konsultasi pada Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan klinik konsultasi	20	PD	17							
30515007	evaluasi LPPD	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi	38	Kab/Kota	38							
30515008	evaluasi LAKIP	Jumlah PD Kategori Peringkat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Nilai A	45	PD	46							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021			Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
30516	Program Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Reviu	18	kali	25							
30516001	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah laporan reviu	5	lap	5							
30516002	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan reviu	9	lap	9							
30516003	Reviu Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah laporan reviu	4	lap	4							
30520	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	76	%	92							
30520001	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat	76	%	72							
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	76	%	92							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021			Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	76	%	92							
30520002	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Dokumen pelaksanaan kegiatan	4	Dok	4							
30521	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat/ PKS	100	%	99							
30521001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	130	pegawai	129							
30579	Program Pencegahan Korupsi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Korupsi	100	%	105							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021			Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
30579001	Koordinasi dan Evaluasi Kerja Sama Pemerintah dan Sektor Swasta	Rapat Kerja Anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur	4	kali	1							
30579002	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Pencanangan pada PD/ satker	2	entitas	2							
30579003	Kerja Sama APIP-APH	Pelaksanaan Bimbingan Teknis	1	kali	1							
		Rapat kerja/Evaluasi Kerja Sama APIP-APH	4	kali	4							
30579004	Peringatan Hari Anti Korupsi	Pelaksanaan Peringatan Hari Anti Korupsi	1	kali	1							
30579005	Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Jumlah evaluasi	4	kali	4							
30579006	Survei Penilaian Integritas	Perangkat daerah yang disurvei	6	PD	-							
30579007	Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi	Pelaksanaan monev rencana aksi pada perangkat daerah	8	PD	10							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021			Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pelaksanaan monev rencana aksi pada Kabupaten/ Kota	12	Kabupaten/ Kota	12								
30579008	Audit Berkala SNI ISO 37001:2016	Jumlah audit internal dan eksternal	2	Kali	2								
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN				85	%	86	104%	75	%	89,30%	119%
		Persentase indikator program yang tercapai				90	%	100	114%	77	%	96,3	125%
		Persentase indikator program Inspektorat yang tercapai								77	%	96,3	125%
		Persentase realisasi anggaran				95	%	91,99	98%	90	%	92,86	103%
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja				85	%	100	118%	85	%	100	118%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021			Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perangkat daerah yang disusun tepat waktu											
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah				28	Dokumen	7	100%	7	Dokumen	7	100%
6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA				4	Dokumen	1	100%	1	Dokumen	1	100%
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan				4	Dokumen	1	100%	1	Dokumen	1	100%
6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA				4	Dokumen	1	100%	1	Dokumen	1	100%
6.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan				4	Dokumen	1	100%	1	Dokumen	1	100%
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja				16	Dokumen	4	100%	4	Dokumen	4	100%
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja				16	Dokumen	4	100%	4	Dokumen	4	100%
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan				48	Dokumen	12	100%	12	Dokumen	12	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021				Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran gaji dan tunjangan				48	laporan	12	100%	12	lapo ran	12	100%
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48	laporan	12	100%	12	lapo ran	12	100%
6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan				48	laporan	12	100%	12	lapo ran	12	100%
6.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah				4	laporan	`	100%	1	lapo ran	1	100%
6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen keuangan SKPD				8	dokumen	2	100%	2	dok ume n	2	100%
6.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP				4	dokumen	1	100%	1	dok ume n	1	100%
6.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan				48	laporan	12	100%	12	lapo ran	12	100%
6.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis				4	laporan	1	100%	1	lapo ran	1	100%
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian				48	dokumen	12	100%	12	dok ume n	12	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021				Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Presensi Pegawai				48	laporan	12	100%	12	lapo ran	12	100%
6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas				4	paket	1	100%	1	pak et	1	100%
6.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan pengolahan administrasi kepegawaian				48	laporan	12	100%	12	lapo ran	12	100%
6.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data pegawai				4	laporan	1	100%	1	lapo ran	1	100%
6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP				48	laporan	12	100%	12	lapo ran	12	100%
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60	orang	131	873%	25	ora ng	14	93%
6.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4	kali	1	100%	1	kali	1	100%
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai				44	laporan	11	100%	11	lap ora n	11	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021			Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa								11	Lap ora n	11	100%
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket pengadaan				4	paket	1	100%	1	pak et	1	100%
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket pengadaan				4	paket	1	100%	1	pak et	1	100%
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket pengadaan				4	paket	1	100%	1	pak et	1	100%
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket pengadaan				4	paket	1	100%	1	pak et	1	100%
6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket pengadaan				160	paket	42	105%	40	pak et	39	98%
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				32	laporan	9	113%	8	lapo ran	8	100%
6.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital				12	Dokumen	3	100%	3	Dok ume n	3	100%
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana				22	laporan	5	100%	5	lapo ran	5	100%
6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				3	paket	0	100%	1	pak et	1	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021			Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya				16	paket	4	100%	4	paket	4	100%
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48	laporan	12	100%	12	laporan	12	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12	laporan	12	100
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman Dokumen				96	kali	25	104%	24	kali	24	100%
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				48	paket	12	100%	3	paket	3	100%
6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa				4	paket	1	100%	1	paket	1	100%
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa				4	paket	1	100%	1	paket	1	100%
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset				48	laporan	12	100%	12	laporan	12	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021				Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara								12	laporan	12	100
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa				44	paket	11	100%	3	paket	3	100%
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa				52	paket	13	100%	13	paket	13	100%
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				4	paket	1	100%	1	paket	1	100%
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara				8	Gedung	2	100%	2	Gedung	2	100%
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur				3	level	3	100%	3	level	3	100%
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Nilai Rata-Rata Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah yang Terperiksa				3	Nilai	3	100%	3	Nilai	3	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021			Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi obyek pengawasan kinerja				20	obyek	20	100%	20	obyek	20	100%
		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan kinerja				10	obyek	16	100	10	obyek	10	100
		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan nilai A atas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja				12	Perangkat Daerah	51	425%	12	Perangkat Daerah	47	392%
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan keuangan				90	obyek	131	146	90	obyek	93	103%
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan reviu Dokumen perencanaan dan penganggaran				1	laporan	1	100%	1	laporan	1	100%
		Jumlah Laporan reviu kinerja				2	laporan	2	100%	2	laporan	2	100%
		Jumlah Laporan reviu pengadaan barang/jasa				1	laporan	1	100%	1	laporan	1	100%
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan reviu terkait Laporan keuangan				7	laporan	16	229%	7	laporan		100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021			Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai dengan kategori tinggi atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah (EKPPD)				30	Kab/Kota	32	107%	30	Kab /Kota		113%
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI				77	%	65,82%	85%	77	%	67	87
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat				77	%	85,7	111%	77	%	91	118%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri RI				80	%	100	125%	80	%	100	125%
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)				5	Jenis Kegiatan	5	100%	5	Jenis Kegiatan	5	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021			Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT)				33	obyek	63	191%	33	obyek	36	109%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur				3		3	100%	3		3	100%
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan				2	Dokumen	2	100%	2	Dokumen	2	100%
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah pelaksanaan koordinasi tentang kebijakan pengawasan				3	kali	3	100%	3	kali	3	100%
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi				85	%	103	121%	85	%	89,91	106%
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi obyek klinik konsultasi				12	Kab/Kota	13	108%	12	Kab/Kota	12	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021			Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah perangkat daerah yang menjadi obyek klinik konsultasi				20	Perangkat Daerah	21	105%	20	Per ang kat Dae rah	20	100%
		Pendampingan atas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK-RI				4	kali	4	100%	4	kali	4	100%
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pencanangan WBKWBBM pada perangkat daerah/unit kerja				2	Perangkat Daerah	2	100%	2	Per ang kat Dae rah	2	100%
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaksanaan identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)				1	kali	1	100%	1	kali	1	100%
		Pelaksanaan monev pencegahan korupsi pada Kab/Kota				10	kali	31	310%	1	kali	10	100%
		Pelaksanaan monev pencegahan korupsi pada perangkat daerah				8	Kab/Kota	8	100%	10	Kab /Kot a	8	100%
		Jumlah peringatan hari anti korupsi				1	Perangkat Daerah	1	100%	8	Per ang kat	1	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024) 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) - 2021			Realisasi Capaian Prog.dan Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
											Dae rah		
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pelaksanaan audit berkala SNI ISO 37001:2016				1	kali	1	100%	1	kali	1	100%
		Jumlah Pelaksanaan Rapat kerja pembahasan kasus/pengaduan masyarakat				30	kali	34	113%	30	kali	30	100%
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi kerja sama APIP-APH				1	kali	1	100%	1	kali	1	100%
		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek Survei Penilaian Integritas (SPI)				6	obyek	56	933%	6	obyek	6	100%
		Rapat kerja anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur				1	kali	1	100%	1	kali	1	100%

Pada tahun 2022, target program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah tercapai rata-rata 100 %. Namun demikian terdapat Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI tidak memenuhi target dari target yang telah ditetapkan yaitu 77%, meskipun tidak tercapai karena masih banyak penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI yang prosesnya masih dalam proses tindak lanjut, terutama yang masih menjadi kendala adalah penyelesaian tindak lanjut di bidang Aset Daerah. Oleh karena itu meskipun belum tercapai, tetapi tidak mengurangi kinerja Inspektorat untuk terus menyelesaikan permasalahan di bidang Aset milik Provinsi Jawa Timur.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dengan menyelenggarakan fungsi:

- perencanaan program pengawasan;
- perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dalam pelaksanaan tugasnya dibagi menjadi :

a. Sekretariat, membawahi:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
3. Subbagian Keuangan.

b. Inspektur Pembantu I;

c. Inspektur Pembantu II;

d. Inspektur Pembantu III;

e. Inspektur Pembantu IV;

f. Inspektur Pembantu Khusus; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam meningkatkan pembinaan pada Tahun 2021 dan 2022 melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dalam rangka peningkatan level Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dalam rangka mempertahankan/meningkatkan Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan :

1. Pengawasan dan Pendampingan yang dilaksanakan oleh Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap Pengelolaan Keuangan dan Belanja pada perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur;
2. Sekretariat Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai *supporting system*, turut berperan dengan melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu dengan :
 - Mensupport kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional (Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian) agar dalam pelaksanaan tugasnya berjalan dengan efektif karena keterbatasan SDM dan waktu pelaksanaan tugas jika dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan.

- Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pengawasan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menggambarkan kesesuaian antara anggaran pengawasan di Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja pengawasan.
 - Monitoring dan evaluasi terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal/ Eksternal, BPKP RI dan BPK RI, yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan Desk/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, BPKP dan BPK RI pada perangkat daerah terperiksa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk penyelesaian tindak lanjutnya hingga mendapatkan status Tuntas.
 - Monitoring dan evaluasi kinerja di 38 Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur Program Prioritas Pembangunan, percepatan penyerapan APBD.
3. Inspektorat Provinsi Jawa Timur juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dengan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah pada 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang diukur dengan persentase Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh kategori \geq Tinggi dan Persentase Penurunan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Rendah;
 4. Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Sekretariat Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi PPG Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) untuk penyusunan konsep kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta memfasilitasi penerusan pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satunya dilakukan sosialisasi tentang gratifikasi dan pencegahannya;
 5. Inspektorat Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur melakukan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan ke Desa meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Desa (BKD), Dana Desa (DD), dan hibah-bansos, dengan membuka ruang konsultasi bagi perangkat desa yang diberi nama “KADES LAWAS” yang merupakan akronim dari KAWAL DESA MELALUI PENGAWASAN. Klinik ini merupakan inisiatif dan inovasi dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan organisasi perangkat daerah Kabupaten untuk bersama-sama memberikan solusi terhadap segala permasalahan terkait pengelolaan bantuan keuangan di Desa yang selama ini dianggap menjadi masalah oleh perangkat desa.

Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yaitu:

Sasaran 1:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator sasaran 1:

1. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Opini BPK RI.

Tabel. 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur

NO	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	IKD	SPM	Target Renstra PD						REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur	v				76	76	76	76	77	77	70,30	73,11	77	77	77
2.	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah		v			81	81	81	81	81	81	83,18	83,83	83,85	83,9	83,9
3.	Opini BPK RI		v			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Pencapaian Kinerja Inspektorat Proviinsi Jawa Timur dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Indeks Integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tercapai dengan realisasi Indeks Integritas tahun 2021 adalah 70,30 dan realisasi indeks integritas tahun 2022 adalah 73,11. Namun demikian nilai Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur di atas rata-rata nilai Nasional yaitu 71,94. Meskipun tidak mencapai target provinsi, namun Indeks Integritas yang didapatkan dari hasil Penilaian Survei Penilaian Integritas menempatkan Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur diatas nilai rata-rata Nasional.
2. Evaluasi SAKIP Inspektorat dalam 3 tahun terakhir mendapatkan Nilai A. Penilaian SAKIP ini didapatkan dari penilaian Kementerian PAN dan RB pada provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2022 terdapat kenaikan nilai Sakip dari nilai 83,18 pada tahun 2021 menjadi 83,83 pada tahun 2022, sehingga terdapat peningkatan nilai SAKIP yang menandakan bahwa Perangkat Daerah telah melaksanakan dan mengimplementasikan SAKIP di lingkungan kerjanya dengan cukup baik, karena tujuan dari evaluasi SAKIP ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).
3. Opini BPK dalam 8 tahun terakhir selalu mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penilaian opini ini menilai tentang kewajaran dalam sebuah laporan keuangan, dimana diperlukan adanya kesesuaian antara standar akuntansi Pemerintah, keefektivitasan penilaian internal, serta kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian penting yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan masih rendah.
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memiliki unit kerja yang berpredikat WBBM.
- c. Risiko korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih tinggi.
- d. Program prioritas daerah belum dilaksanakan secara optimal.
- e. Adanya perubahan mekanisme berbasis aplikasi yang terlambat disosialisasikan.
- f. Kurangnya komitmen Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menyelesaikan TLHP.
- g. Kerjasama antara APIP-APH belum berjalan dengan baik, sehingga masih terdapat kasus/pengaduan masyarakat yang langsung ditangani APH tanpa berkoordinasi dengan APIP.

Dari Permasalahan yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur antara lain :

- a. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundangan bagi obyek pengawasan, khususnya terkait pengelolaan keuangan.
- b. Peningkatan kualitas implementasi pembangunan ZI menuju WBKWBBM.
- c. Peningkatan internalisasi anti korupsi dan integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- d. Peningkatan kualitas pengawasan kinerja terhadap program prioritas daerah.
- e. Peningkatan pemahaman terhadap mekanisme baru yang berbasis aplikasi.
- f. Percepatan penyelesaian TLHP BPK-RI.
- g. Penguatan komitmen bersama antara APIP-APH dalam rangka penanganan kasus.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA TIMUR

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Inspektorat Provinsi Jawa Timur berikut :

TABEL T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Rancangan Awal RKPD 2024										Kode	Hasil Analisis Kebutuhan										
Kode		Program/Keg		Loka si	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp....)		Program/Keg		Loka si	Indikator Kinerja		Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catat an Penti ng		
1		2		3	4		5		6		7		8	9		10		11	12		
6						Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6	1					Inspektorat Daerah				94.722.266. 000	6.01	Inspektorat Daerah						86.045.483. 146			
6	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Jaw a Timu r	Indeks profesionalitas ASN	85	Nilai	78.017.113. 900	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Jaw a Timu r	Indeks profesionalitas ASN	85	Nilai	72.968.327. 676	
							Persentase indikator program yang tercapai		90	%					Persentase indikator program yang tercapai		90	%			
							Persentase realisasi anggaran		95	%					Persentase realisasi anggaran		95	%			
6	1	1	1.0 1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jaw a Timu r	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	85	%	19.347.000	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jaw a Timu r	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	85	%	19.347.000	
6	1	1	1.0 1	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	3.864.000	6.01.01.1.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	3.864.000	

Rancangan Awal RKPD 2024											Kode	Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode					Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp....)		Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catat an Penti ng
1					2	3	4	5		6		7	8	9	10		11	12
6	1	1	1.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.294.000	6.01.01.1.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.294.000	
6	1	1	1.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.294.000	6.01.01.1.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.294.000	
6	1	1	1.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.153.000	6.01.01.1.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.153.000	
6	1	1	1.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.153.000	6.01.01.1.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.153.000	
6	1	1	1.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	3.859.000	6.01.01.1.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	3.859.000	
6	1	1	1.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	2.730.000	6.01.01.1.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	2.730.000	

Rancangan Awal RKPD 2024										Kode	Hasil Analisis Kebutuhan									
Kode					Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catat an Penti ng		
1					2	3	4		5		6		7	8	9		10		11	12
6	1	1	1.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan		12	Laporan	71.429.465. 900	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan		12	Laporan	66.225.408. 700	
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		15 8	Orang/ Bulan	69.870.954. 000	6.01.01.1.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		15 8	Orang/ Bulan	64.277.174. 000	
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	Dokumen	1.521.792.9 00	6.01.01.1.02.0 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	Dokumen	1.923.281.5 00	
				3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	Dokumen	24.056.000	6.01.01.1.02.0 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	Dokumen	15.390.000	
				4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1	Dokumen	2.163.000	6.01.01.1.02.0 004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1	Dokumen	1.603.000	
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	Laporan	2.268.000	6.01.01.1.02.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	Laporan	1.308.000	
				6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1	Dokumen	2.268.000	6.01.01.1.02.0 006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1	Dokumen	1.643.200	

Rancangan Awal RKPD 2024										Kode	Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode					Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catat an Penti ng
1					2	3	4	5		6		7	8	9	10		11	12
				7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	12	Laporan	5.145.000	6.01.01.1.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semeste ran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	12	Laporan	4.190.000	
				8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	819.000	6.01.01.1.02.0 008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	819.000	
6	1	1	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jaw a Timu r	Jumlah Dokumen Kepegawaian	12	Dokumen	687.333.00 0	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jaw a Timu r	Jumlah Dokumen Kepegawaian	12	Dokumen	687.333.00 0	
				1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	50.000.000	6.01.01.1.05.0 001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	50.000.000	
				2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	8.100.000	6.01.01.1.05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	8.100.000	
				3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	1.365.000	6.01.01.1.05.0 003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	1.365.000	
				4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	19.110.000	6.01.01.1.05.0 004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	19.110.000	

Rancangan Awal RKPD 2024										Kode	Hasil Analisis Kebutuhan									
Kode					Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catat an Penti ng		
1					2	3	4		5		6		7	8	9		10		11	12
					5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	182.858.00 0		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	182.858.00 0		
					9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	234.091.00 0		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	234.091.00 0		
					1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	13 8	Orang	191.809.00 0		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	13 8	Orang	191.809.00 0		
6	1	1	1.0 6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jaw a Timu r	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai	4	Dokumen	1.125.173.0 00	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jaw a Timu r	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai	4	Dokumen	1.125.173.0 00		
					1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	47.810.000	6.01.01.1.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	47.810.000		
					2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	417.353.00 0	6.01.01.1.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	417.353.00 0		
					3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	155.157.00 0	6.01.01.1.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	155.157.00 0		
					5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	207.111.00 0	6.01.01.1.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	207.111.00 0		

Rancangan Awal RKPD 2024										Kode	Hasil Analisis Kebutuhan								
Kode		Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Loka si		Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catat an Penti ng				
1		2	3	4	5		6		7	8	9	10		11	12				
					8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	Laporan	18.522.000	6.01.01.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	Laporan	18.522.000	
					9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	277.715.000	6.01.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	277.715.000	
					10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	Dokumen	1.505.000	6.01.01.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	Dokumen	1.505.000	
				1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana	4	Dokumen	690.795.000	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana	4	Dokumen	538.795.000	
					5	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	400.000.000	6.01.01.1.07.005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	178.000.000	
					6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	290.795.000	6.01.01.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	360.795.000	
											-							-	
				1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Dokumen	3.086.536.000	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Dokumen	2.942.451.976	
					1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	20.837.000	6.01.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12.000.000	

Rancangan Awal RKPD 2024										Kode	Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode					Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp....)	Catat an Penti ng						
1					2	3	4	5		6		7	8	9	10		11	12
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	570.199.000	6.01.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	570.199.000	
				3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	92.610.000	6.01.01.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	92.610.000	
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.402.890.000	6.01.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.267.642.976	
				1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Aset	12	Laporan	978.464.000	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Aset	12	Laporan	1.429.819.000	
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	Unit	90.991.000	6.01.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	Unit	142.346.000	
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	520.813.000	6.01.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	520.813.000	

Rancangan Awal RKPD 2024										Kode	Hasil Analisis Kebutuhan									
Kode					Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catat an Penti ng		
1					2	3	4		5		6		7	8	9		10		11	12
				6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		120	Unit	219.660.000	6.01.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		120	Unit	419.660.000	
				9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	147.000.000	6.01.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	347.000.000	
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jawa Timur	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur		3	Level	9.904.290.100	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jawa Timur	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur		3	Level	9.904.290.100	
			1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jawa Timur	Nilai rata-rata maturitas SPIP pada perangkat daerah terperiksa		3	Nilai	7.814.495.100	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jawa Timur	Nilai rata-rata maturitas SPIP pada perangkat daerah terperiksa		3	Nilai	7.814.495.100	
				1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		1	Laporan	1.042.404.370	6.01.02.1.01.001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		1	Laporan	604.404.370	
				2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		90	Laporan	4.509.586.730	6.01.02.1.01.002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		90	Laporan	4.303.940.000	
				3	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		2	Laporan	97.753.000	6.01.02.1.01.003	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		2	Laporan	97.753.000	
				4	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		5	Laporan	219.559.000	6.01.02.1.01.004	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		7	Laporan	164.862.000	

Rancangan Awal RKPD 2024										Kode	Hasil Analisis Kebutuhan									
Kode					Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catat an Penti ng		
1					2	3	4		5		6		7	8	9		10		11	12
				5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		38	Laporan	875.083.000	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		18	Laporan	875.083.000	
				7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		4	Dokumen	1.070.109.000	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		4	Dokumen	1.070.109.000	
				1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jawa Timur	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		5	Jenis	2.089.795.000	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jawa Timur	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		5	Jenis	1.889.795.000	
				2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		15	Laporan	2.089.795.000	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		15	Laporan	1.889.795.000	
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jawa Timur	Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur		3	Level	6.800.862.000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jawa Timur	Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur		3	Level	4.071.209.100	
				1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jawa Timur	Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan		2	Dokumen	402.441.000	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jawa Timur	Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan		2	Dokumen	317.424.100	

Rancangan Awal RKPD 2024										Kode	Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode					Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp....)	Program/Keg	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp....)	Catat an Penti ng
1					2	3	4	5		6		7	8	9	10		11	12
				1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rekomend asi	402.441.00 0	6.01.03.1.01.0 001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rekomend asi	317.424.10 0	
			1.0 2		Pendampingan dan Asistensi	Jaw a Timu r	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	85	%	6.398.421.0 00	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jaw a Timu r	Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	85	%	3.753.785.0 00	
				1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40	Perangkat Daerah	1.050.799.0 00	6.01.03.1.02.0 001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40	Perangkat Daerah	750.799.00 0	
				2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Perangkat Daerah	105.272.00 0	6.01.03.1.02.0 002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Perangkat Daerah	280.636.00 0	
				3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3	Kegiatan	4.028.611.0 00	6.01.03.1.02.0 003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3	Kegiatan	828.611.00 0	
				4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20	Perangkat Daerah	1.213.739.0 00	6.01.03.1.02.0 004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20	Perangkat Daerah	1.893.739.0 00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terkait pembahasan Anggaran Tahun 2024 bersama berbagai pemangku kepentingan, tidak terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang hadir dalam forum Musrenbang tersebut. Selain hal tersebut, dalam forum Musrenbang yang dilakukan melalui media Website musrenbang juga tidak terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.5.1. Usulan kabupaten kota hasil pelaksanaan musrenbang RKPD Tahun 2024 yang di akomodir

Tidak Terdapat Usulan Program/ Kegiatan.

Tabel 2.5.2. Usulan kabupaten kota hasil pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2024 yang di TIDAK DIAKOMODIR

Tidak Terdapat Usulan Program/ Kegiatan.

Tabel 2.5.3. Dukungan perangkat daerah dalam pokok-pokok pikiran Dewan

Tidak Terdapat Usulan Program/ Kegiatan.

3.1. A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mencapai keselarasan antara pembangunan Nasional dengan Pembangunan di Daerah, maka RKPD Provinsi Jawa Timur harus berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur harus mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024. Visi pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024 yaitu : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Upaya-upaya dalam mewujudkan visi nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 9 misi Pembangunan Nasional, dimana dari 9 misi nasional tersebut Inspektorat mengampu Misi Nasional ke 8 antara lain : **“Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”**.

Terdapat 7 prioritas Pembangunan Nasional pada Tahun 2024, dimana Inspektorat selaras dengan prioritas Nasional ke 7 yaitu : **“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**

Pelaksanaan program-program yang terdapat di Inspektorat ini dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan Kebijakan Nasional dari KPK dan juga peraturan dari pusat antara lain :

- a. Pelaksanaan Monev terhadap Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- b. Sapu Bersih Pungutan Liar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- c. Pelaksanaan Maturitas SPIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
- d. Survey Integritas dari KPK dan BPS untuk menilai tingkat integritas di Provinsi Jawa Timur. Survey dilakukan untuk memetakan resiko korupsi

B. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI

Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Kemudian tema tersebut diterjemahkan ke dalam arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur “Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : **“Masyarakat yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui kerja Bersama dan semangat gotong royong”**. Visi tersebut kemudian dijabarkan lagi menjadi 4 misi utama, dimana Inspektorat mengampu pada Misi ke – 3 yaitu : **“Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan Ruang**

Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan". Setelah Tema RKP 2024 telah ditentukan, selanjutnya Tema RKP 2024 ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Tema Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yaitu **"Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif Menuju Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak"**.

Terdapat 7 Prioritas Pembangunan Jawa Timur Tahun 2024, dimana Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaras dengan Prioritas ke-7 Provinsi Jawa Timur yaitu : **"Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur"**. Berdasarkan prioritas provinsi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur, dimana Inspektorat selaras dengan **Bhakti ke-8** yaitu **"Jatim Amanah"** dengan tujuan untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Anti Korupsi. Pelaksanaan Strategis dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Perlunya Peningkatan Kualitas SDM.
2. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal.
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Publik Pendukung Pertumbuhan Wilayah.
4. Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting, dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.
5. Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6. Peningkatan Kapasitas terhadap Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana.

Prioritas Pembangunan Jawa Timur Tahun 2024 ada 7 prioritas, namun Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengampu Prioritas **"Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur"** dengan mewujudkan prioritas tersebut melalui pendekatan-pendekatan tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Timur "Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi", sehingga diharapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dapat terwujud.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Inspektorat diawali dengan menyelaraskan Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur. Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur antara lain :

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 4 Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur, dimana Inspektorat Provinsi Jawa Timur mendukung Misi Gubernur yang ke – 3 yaitu :

“Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai Prinsip Kebhinekaan”.

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditetapkanlah Tujuan Pembangunan Daerah selama 5 tahun ke depan yang merupakan pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran dari visi maupun misi dimana mendapatkan solusi dalam permasalahan dan isu strategis yang mengemuka.

Sasaran sendiri merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan dapat dicapai serta rasional.

Tujuan pada Misi ke 3 yang selaras dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur antara lain : **“Terwujudnya Pemerintahan yang Baik”**. Kemudian di *breakdown* ke dalam sasaran pembangunan Provinsi pada Misi ke-3 antara lain : **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel”**.

Berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Provinsi yang mengacu pada Misi ke-3 Gubernur Jawa Timur, selanjutnya di *breakdown* ke Tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Timur yaitu : **“Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi”**. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran agar menjadi terukur dan focus, efektif dan spesifik, serta dapat dicapai dengan sasaran Inspektorat sebagai berikut : **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**.

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2024 perlu dilakukan dengan tetap mempedomani Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Di samping itu, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

Target tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Timur

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN						SATUAN	FORMULASI
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur	76	76	76	76	77	77	-	Hasil Survey Penilaian Integritas oleh KPK
			Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81	81	81	81	81	81	-	Rata – Rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
			Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah :

“Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi”.

Indikator pencapaian tolok ukur keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui nilai indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Indeks Integritas ini dirilis oleh KPK setiap tahun melalui mekanisme penilaian dari Survei Penilaian Integritas untuk memetakan risiko korupsi di Provinsi Jawa Timur

Tujuan ini dijabarkan lebih detail ke dalam bentuk sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur antara lain :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran tersebut maka ditetapkan indikator dari sasaran tersebut antara lain :

1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Peningkatan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diukur dari Rata-rata nilai evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Bila semakin baik nilai SAKIP biasanya selaras dengan peningkatan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Opini BPK RI

Opini BPK merupakan Pernyataan atau pendapat professional yang dikeluarkan oleh BPK. Opini tersebut merupakan penilaian tentang tingkat kewajaran informasi yang tersaji pada laporan keuangan. Tingkat Kewajaran tersebut harus sesuai dengan prinsip akuntansi baik itu dalam hal arus kas entitas, hasil usaha dan posisi keuangan.

Inspektorat dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut selalu memperoleh opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kriteria WTP diberikan ketika Sistem Pengendalian Internal memadai dan tidak ada salah saji yang bersifat material atas pos-pos laporan keuangan. Dengan kata lain laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain Terkait dengan visi Gubernur terpilih yaitu : Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, yang diterjemahkan ke dalam misi Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris sehingga untuk mencapai visi misi gubernur tersebut

diperlukan beberapa kegiatan baru untuk mendukung pencapaian visi misi gubernur Jatim tersebut antara lain :

1. Adanya kegiatan dari KPK yang akan menilai tingkat integritas di Jawa Timur, sehingga Inspektorat menambahkan kegiatan Survey Penilaian Integritas.
2. Adanya program/ kegiatan dari KPK yang harus diakomodir antara lain terkait pungutan liar, sehingga diperlukan kegiatan tambahan yang dimasukkan antara lain kegiatan Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar.
3. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang terintegrasi oleh BPKP.
4. Adanya banyaknya pengaduan masyarakat kepada Inspektorat selaku APIP, sehingga dibutuhkan program/ kegiatan yang memerlukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum seperti Polri dan Kejari, sehingga diperlukan kegiatan tambahan yang dimasukkan antara lain Kerja Sama APIP-APH
5. Adanya banyak masalah dalam meng SPJ kan keuangan di desa, sehingga memunculkan ide untuk membuat program inovasi pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk Klinik Konsultasi Bantuan Keuangan di Desa.

Rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain Inspektorat memiliki 3 program dan 11 kegiatan 52 sub kegiatan, dengan total pagu anggaran yang direncanakan pada tahun 2024 yaitu Rp. **86.045.483.146,00**. Tabel rencana program dan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8		10
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6.01	Inspektorat Daerah					86.045.483.146	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.045.483.146
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	Jawa Timur	85	Nilai	72.968.327.676	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	85	Nilai	72.968.327.676
		Persentase indikator program yang tercapai		90	%			90	%	
		Persentase realisasi anggaran		95	%			95	%	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jawa Timur	85	%	19.347.000		85	%	19.347.000
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8	Dokumen	3.864.000		8	Dokumen	3.864.000
6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	Dokumen	2.294.000		1	Dokumen	2.294.000
6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	Dokumen	2.294.000		1	Dokumen	2.294.000
6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	Dokumen	2.153.000		1	Dokumen	2.153.000
6.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	Dokumen	2.153.000		1	Dokumen	2.153.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4	Laporan	3.859.000			4	Laporan	3.859.000
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	Laporan	2.730.000			4	Laporan	2.730.000
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan	Jawa Timur	12	Laporan	66.225.408.700			12	Laporan	66.225.408.700
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		158	Orang/ Bulan	64.277.174.000			158	Orang/ Bulan	64.277.174.000
6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	Dokumen	1.923.281.500			12	Dokumen	1.923.281.500
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	Dokumen	15.390.000			12	Dokumen	15.390.000
6.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1	Dokumen	1.603.000			1	Dokumen	1.603.000
6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	Laporan	1.308.000			2	Laporan	1.308.000
6.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1	Dokumen	1.643.200			1	Dokumen	1.643.200
6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	Laporan	4.190.000			12	Laporan	4.190.000
6.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	Dokumen	819.000			1	Dokumen	819.000
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Jawa Timur	12	Dokumen	687.333.000			12	Dokumen	687.333.000
6.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1	Unit	50.000.000			1	Unit	50.000.000
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1	Paket	8.100.000			1	Paket	8.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
6.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12	Dokumen	1.365.000			12	Dokumen	1.365.000
6.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1	Dokumen	19.110.000			1	Dokumen	19.110.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		12	Dokumen	182.858.000			12	Dokumen	182.858.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		50	Orang	234.091.000			50	Orang	234.091.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		138	Orang	191.809.000			138	Orang	191.809.000
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai	Jawa Timur	4	Dokumen	1.125.173.000			4	Dokumen	1.125.173.000
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	Paket	47.810.000			1	Paket	47.810.000
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Paket	417.353.000			1	Paket	417.353.000
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	Paket	155.157.000			1	Paket	155.157.000
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	Paket	207.111.000			1	Paket	207.111.000
6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		50	Laporan	18.522.000			50	Laporan	18.522.000
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		8	Laporan	277.715.000			8	Laporan	277.715.000
6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		3	Dokumen	1.505.000			3	Dokumen	1.505.000
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana	Jawa Timur	4	Dokumen	538.795.000			4	Dokumen	538.795.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	Paket	178.000.000			1	Paket	178.000.000
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4	Unit	360.795.000			4	Unit	360.795.000
						-					-
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	4	Dokumen	2.942.451.976			4	Dokumen	2.942.451.976
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	Laporan	12.000.000			12	Laporan	12.000.000
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan	570.199.000			12	Laporan	570.199.000
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	Laporan	92.610.000			12	Laporan	92.610.000
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Laporan	2.267.642.976			12	Laporan	2.267.642.976
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Aset	Jawa Timur	12	Laporan	1.429.819.000			12	Laporan	1.429.819.000
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		3	Unit	142.346.000			3	Unit	142.346.000
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		34	Unit	520.813.000			34	Unit	520.813.000
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		120	Unit	419.660.000			120	Unit	419.660.000
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	347.000.000			1	Unit	347.000.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	3	Level	9.904.290.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3	Level	9.904.290.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Nilai rata-rata maturitas SPIP pada perangkat daerah diperiksa	Jawa Timur	3	Nilai	7.814.495.100			3	Nilai	7.814.495.100
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		1	Laporan	604.404.370			1	Laporan	604.404.370
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		90	Laporan	4.303.940.000			90	Laporan	4.303.940.000
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		2	Laporan	97.753.000			2	Laporan	97.753.000
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		5	Laporan	164.862.000			5	Laporan	164.862.000
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		38	Laporan	875.083.000			38	Laporan	875.083.000
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		4	Dokumen	1.070.109.000			4	Dokumen	1.070.109.000
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jawa Timur	5	Jenis	1.889.795.000			5	Jenis	1.889.795.000
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		15	Laporan	1.889.795.000			15	Laporan	1.889.795.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	3	Level	4.071.209.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3	Level	4.071.209.100
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan	Jawa Timur	2	Dokumen	317.424.100			2	Dokumen	317.424.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Keg	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		2	Rekomendasi	317.424.100			2	Rekomendasi	317.424.100
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jawa Timur	85	%	3.753.785.000			85	%	3.753.785.000
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		40	Perangkat Daerah	750.799.000			40	Perangkat Daerah	750.799.000
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		5	Perangkat Daerah	280.636.000			5	Perangkat Daerah	280.636.000
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		3	Kegiatan	828.611.000			3	Kegiatan	828.611.000
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		20	Perangkat Daerah	1.893.739.000			20	Perangkat Daerah	1.893.739.000

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, Sehubungan dengan sasaran tersebut di atas, disusunlah arah kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur yaitu: [1] Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat; [2] Penguatan aksi anti-korupsi dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); [3] Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu; dan [4] Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tertuang pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Prioritas Provinsi Tahun 2024 yang juga terdiri dari 5 prioritas. Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang terkait langsung dengan prioritas provinsi ke-7 yaitu “Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur” Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat mengajukan usulan kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan Reformasi Birokrasi yaitu “melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention), mengawal dan mengkoordinasikan pelaksanaan Survey Penilaian Integritas, Pengawasan Percepatan Pelaksanaan Peningkatan Produk Dalam Negeri, meningkatkan kualitas pelaksanaan Maturitas SPIP Terintegrasi, meningkatkan Kapabilitas APIP, SABER PUNGLI DAN GRATIFIKASI” yang diimplementasikan pada kegiatan-kegiatan antara lain Pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi; Verifikasi/Reviu Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) di Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur; dan Identifikasi Potensi Pungutan Liar.

Tabel 4.1 program kegiatan yang mendukung program prioritas provinsi dan program Icon Gubernur tahun 2024

Prioritas Provinsi	Nawabhakti	Program Icon	Uraian Keg Prioritas	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Sub Keg Nomenklatur	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
PP-7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Bhakti - 8 Jatim : Jatim Amanah : Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, Efektif, dan Anti Korupsi	Pengawasan	Pelaksanaan Pengawasan Keuangan pada PD/Unit Kerja di lingkungan Pemprov Jatim	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	PAD	4.303.940.000	
			Pembinaan PD/unit kerja di lingkungan Pemprov Jatim Menuju WBK/WBBM	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PAD	280.636.000	
			Pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan Monitoring Center Preventif (MCP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	PAD	828.611.000	

Tabel 4.2 Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Uraian Keg Prioritas Inspektorat	Program Nomenklatur	Keg Nomenklatur	Sub Keg Nomenklatur	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	PAD	7.116.151.370
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PAD	280.636.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	"Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	PAD	828.611.000

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang dapat menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Disamping itu penyusunan Renja 2024 ini merupakan bagian dari alur pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat 1, penyusunan rancangan KUA PPAS ini berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Irban, Irban khusus dan seluruh staf Penyusunan Program dan Pelaporan Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak Lanjut untuk Tahun 2024 ini akan melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah berjalan di Tahun 2022 dan akan terus melaksanakan Program pembinaan ke Perangkat Daerah seperti antara lain pelaksanaan :

- a. Pengawasan operasional ke Perangkat Daerah.
- b. Pelaksanaan Reviu ke Perangkat Daerah
- c. Pelaksanaan MCP KPK RI
- d. Pelaksanaan SPI Provinsi Jawa Timur
- e. Pelaksanaan Kapabilitas APIP
- f. Pelaksanaan Maturitas SPIP.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 disusun sebagai *road map* dan pedoman bagi penyusunan APBD Tahun 2024 sehingga arah kegiatan dan capaian kinerja program/kegiatan tahun 2024 dapat lebih transparan dan akuntabel dalam rangka pencapaian penetapan tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong.”**

Surabaya, Juli 2023

Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si., CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP. 19630325 198903 1 013

